

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

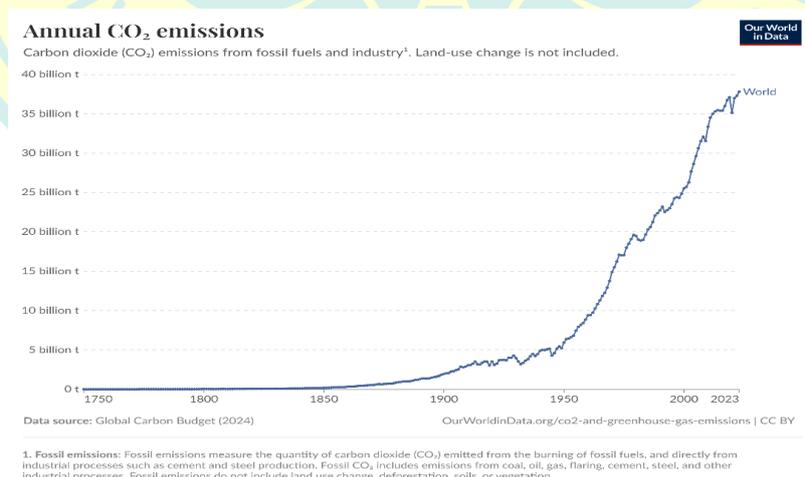
Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, damai dan tentram dalam kehidupan sehari-harinya. Hal itu mencakup hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, serta bebas dari ancaman yang merusak kualitas hidup. Tujuan dari lingkungan yang bersih dan sehat yaitu untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati udara yang segar, air yang layak konsumsi, serta tanah subur yang mendukung keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Disisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, berbagai permasalahan lingkungan muncul sebagai tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu global yang tidak lagi menjadi sekedar prediksi, akan tetapi telah menjadi kenyataan yang dihadapi berbagai kalangan di berbagai negara.

Terjadinya perubahan iklim membuat masyarakat Indonesia sadar bahwa hal tersebut merupakan permasalahan yang terus meningkat dan memiliki dampak serius bagi kehidupan sehari-hari, seperti mulai meningkatnya frekuensi banjir bandang, kekeringan yang berkepanjangan, hingga seringnya terjadi tanah longsor (Irativi & Sulfitri, 2023). Adapun penyebab utamanya yaitu pemanasan global yang membuat bumi semakin panas.

Panasnya suhu bumi pada tahun 2023 menurut Nuswantoro (2023) dalam laporannya dari Mongabay Indonesia merupakan suhu terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah dengan angka sebesar 1,4°C suhu dasar praindustri 1850-1900. Pernyataan Bill Nelson yang merupakan perwakilan NASA juga

mengungkapkan bahwa suhu panas tahun 2023 yang mencapai rekor ini bukan hanya sekedar angka, melainkan membawa konsekuensi yang mengancam kehidupan dan penghidupan seluruh dunia. Pemanasan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam menghasilkan emisi yang diperparah El Nino inilah yang membuat suhu bumi terus mengalami peningkatan.

Menurut laporan *Our World in Data* (2024) sebelum revolusi industri, pertumbuhan emisi karbon masih tergolong rendah hingga pertengahan abad ke-20. Memasuki tahun 1950, tingkat emisi karbon di dunia secara perlahan mulai meningkat sebesar 6 miliar ton CO₂, diikuti dengan pengeluaran emisi yang terjadi di tahun 1990 sebanyak hampir empat kali lipat mencapai lebih dari 20 miliar ton. Emisi ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yang mencapai lebih dari 37,79 miliar ton setahun. Di bawah ini merupakan grafik kenaikan emisi yang terjadi selama tahun 1850 hingga 2023.

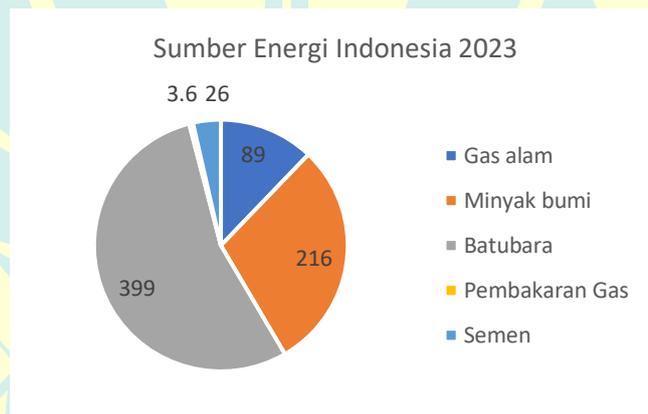


Gambar 1. 1 Kenaikan Emisi Karbon Tahun 1850-2023

Sumber: *Our World in Data* (2024) diakses pada 25 Februari 2025

Peningkatan emisi yang terjadi di dunia atas negara-negara penghasil emisi karbon juga dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari *Global Carbon Atlas*

(2024) yang menunjukkan bahwa banyaknya penghasil emisi terbesar saat ini berada di Asia, salah satunya Indonesia yang menyumbang hampir sekitar 733 MtCO₂ pada tahun 2023. Sehingga mengakibatkan Indonesia berada pada peringkat 10 teratas, khususnya pada peringkat ke-8 dengan menghasilkan gas alam sebanyak 89 MtCO₂, minyak bumi sebanyak 216 MtCO₂, batubara sebanyak 399 MtCO₂, pembakaran gas sebanyak 3,6 MtCO₂, dan semen sebanyak 26 MtCO₂. Masing-masing sumber energi tersebut berperan besar terhadap meningkatnya emisi di atmosfer, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.



Gambar 1. 2 Sumber Energi Indonesia tahun 2023

Sumber: *Global Carbon Atlas* (2024) diakses pada 25 Februari 2025

Indonesia dengan berbagai sumber energi yang dihasilkan tersebut, utamanya berasal dari aktivitas industri yang terus mengalami perkembangan. Berkembangnya suatu industri membuat emisi karbon dari aktivitas tersebut juga meningkat, yang pada akhirnya memperburuk kualitas udara. Buruknya kualitas udara akibat pencemaran yang terjadi dapat ditemukan pada kasus PLTU 1&2 Nagan Raya yang hingga kini masi beroperasi di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Menurut Sigit (2024),

dalam operasinya untuk menghasilkan energi listrik, PLTU 1&2 Nagan Raya menggunakan teknik *co-firing*, yaitu proses pembakaran yang mencampur biomassa seperti cangkang sawit, serbuk gergaji dan sekam padi dengan batu bara. Metode ini diklaim mampu menghasilkan energi bersih. Namun, pada nyatanya, penerapan teknik *co-firing* ini masih menghasilkan emisi dan tidak sepenuhnya menghasilkan energi hijau, sehingga dapat memperburuk kondisi lingkungan.

Bercermin dari kasus yang terjadi, sudah semestinya bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya tidak hanya berfokus pada *profit*, namun juga berfokus pada kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat atas dampak emisi yang dihasilkan, termasuk seberapa besar atau baik perusahaan dalam mengelola dan mengurangi emisi (Iratiwi & Sulfitri, 2023). Hal ini sesuai dengan konsep *triple bottom line* (3P atau *people, planet, and profit*) oleh Elkington (1994) dalam (Az Zahra & Aryati, 2023) yang menyatakan bahwa perusahaan juga harus memperhatikan *people and planet* disamping *profit* yang ingin dicapai.

Selain itu, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan untuk lebih memperhatikan *people and planet* dapat didukung oleh aksi anak muda Indonesia dalam mendorong terbentuknya komunitas perubahan iklim yang disebut AMJI (Aksi Muda Jaga Iklim). Melalui AMJI pada tahun 2024, terdapat sekitar 65.000 anak muda dari seluruh Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan seperti penanaman mangrove, bersih-bersih sampah, hingga diskusi mengenai pemanasan global (Saefullah, 2025).

Berbagai upaya yang telah lama dilakukan oleh Indonesia hingga saat ini dalam memerangi perubahan iklim dan pemanasan global juga dapat ditunjukkan dengan mengikuti perjanjian internasional yang disebut dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto lahir sebagai tindak lanjut dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC yang disepakati pada tahun 1992 yang kemudian disahkan pada tahun 1997 dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global, terutama dengan mewajibkan negara-negara maju untuk memenuhi target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum. Adapun upaya Indonesia terhadap Protokol Kyoto tersebut dapat ditunjukkan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2004 (Irwhantoko & Basuki, 2016). Selain itu, komitmen Indonesia lainnya untuk mengurangi emisi GRK juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Selanjutnya, pada tahun 2015, sidang *Conference of the Parties* (COP) yang ke-21, *United Nations Framework Convention on Climate Change* - UNFCCC mulai menyepakati pengadopsian Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai pengganti Protokol Kyoto dengan tujuan untuk mengurangi peningkatan suhu rata-rata global sebesar 1,5°C hingga 2°C. Indonesia memperkuat komitmennya terhadap Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2016 dengan menetapkan target penurunan emisi karbon pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan

bantuan internasional (Florenca & Handoko, 2021). Di tahun yang sama dengan Perjanjian Paris, upaya Indonesia terus dilakukan dengan meratifikasi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di bulan September 2015 (Gunawan & Aryati, 2024). Dalam hal ini, Indonesia berfokus pada TPB No. 13 tentang penanganan perubahan iklim dengan target yang diperkirakan akan terealisasi pada tahun 2030.

Sejalan dengan regulasi dan perjanjian yang telah ditetapkan, pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu aspek penting bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja terkait lingkungan. Pengungkapan emisi karbon dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait emisi karbon yang dihasilkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* dan masyarakat. Perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya akan memiliki citra positif bagi para pemangku kepentingan karena perusahaan dinilai memiliki kemampuan dalam melakukan transparansi terkait emisi karbon yang dihasilkan selama aktivitas operasionalnya. Kini, pengungkapan emisi karbon di Indonesia masih terbilang sukarela, artinya perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Indonesia belum berkewajiban untuk mengungkapkan emisi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang ketat untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Meskipun belum adanya aturan hukum yang memaksa semua perusahaan untuk melaporkan emisi karbonnya, tekanan dari *stakeholder* membuat pengungkapan ini seperti “wajib” dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Kewajiban tersebut diperkuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017,

yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca dari operasional perusahaan. Adapun teori legitimasi merupakan dasar dari pentingnya dilakukan pengungkapan emisi karbon. Suatu perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, harus dapat menyesuaikan diri dengan norma dan ekspektasi masyarakat, artinya diperlukan upaya-upaya perusahaan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan dapat diterima dan dapat mempertahankan legitimasi yang ada. Dengan begitu, pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu aspek mendasar yang benar-benar membuat masyarakat yakin bahwa perusahaan memang transparan atas emisi yang dihasilkan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, diantaranya Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon dan Kepemilikan Institusional.

Yang pertama memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon yaitu modal intelektual hijau. Modal intelektual hijau yaitu satu kesatuan interaksi yang menitikberatkan pada bagaimana suatu perusahaan peduli tentang lingkungannya melalui aset tidak berwujud, seperti pengetahuan karyawan, komitmen perusahaan, serta relasinya dengan para pemasok, investor ataupun pelanggan. Modal intelektual hijau memiliki tiga komponen utama yaitu modal manusia hijau, modal struktural hijau, dan modal relasional hijau. Modal manusia hijau mencakup pengetahuan serta kemampuan karyawan dalam kontribusinya pada inovasi dan produktivitas lingkungan. Modal struktural hijau mencakup sistem dan prosedur yang memungkinkan karyawan melakukan tugas-tugasnya

dalam mendukung pencapaian tujuan berkelanjutan. Serta para relasinya (pemasok, investor, ataupun pelanggan) yang berinteraksi dengan perusahaan dan memberikan respon terhadap keberlanjutan perusahaan.

Komponen-komponen modal intelektual hijau tersebut sangat penting dalam berjalannya suatu perusahaan. Tanpa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan, perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas lingkungannya. Tanpa sistem yang jelas, karyawan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tanpa relasi, karyawan tidak akan memiliki tujuan. Maka dari itu, ketiga komponen modal intelektual hijau merupakan bagian penting dari suatu perusahaan yang saling membantu dan bekerja sama untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawannya yang peduli terhadap lingkungan akan melakukan upaya untuk memenuhi keinginan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitasnya dengan cara melakukan pengungkapan emisi karbon.

Putra & Lindrianasari (2024), Oktris (2018), dan Fabia (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa modal intelektual hijau berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini dikarenakan semakin besar modal intelektual hijau dalam suatu perusahaan, maka kesadaran lingkungan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon juga besar. Banyaknya sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam modal intelektual hijau membuat perusahaan lebih cepat dalam mengelola dan mengungkapkan emisi karbonnya. Menurut penelitian Yusliza *et al.* (2020) mendukung adanya pengaruh modal intelektual hijau terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Ariani & Puspita (2024) menunjukkan bahwa hanya modal relasional hijau yang berpengaruh terhadap implementasi laporan keberlanjutan, sedangkan modal manusia hijau dan modal struktural hijau tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan laporan. Selain itu, Yusoff *et al.* (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa hanya modal struktural hijau dan modal relasional hijau yang berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis, sedangkan modal manusia hijau tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis.

Selanjutnya dalam mendukung dilakukannya pengungkapan emisi karbon, biaya lingkungan juga dapat berperan atas semua pengeluaran perusahaan yang diakibatkan karena adanya kerusakan lingkungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Kotango *et al.*, (2024), timbulnya biaya lingkungan perusahaan dapat diakibatkan karena adanya sistem manajemen lingkungan yang lemah, yang umumnya disebabkan oleh ketidaksempurnaan perusahaan dalam proses produksinya. Adanya biaya lingkungan ini perlu menjadi perhatian perusahaan, karena biaya lingkungan merupakan salah satu elemen biaya yang menjadi penyeimbang kepentingan antara perusahaan dengan lingkungannya (Prasetyo & Adi, 2020). Tercapainya keterseimbangan perusahaan dengan lingkungannya dapat ditunjukkan melalui ketersediaan perusahaan dalam mengeluarkan biaya lingkungannya akibat dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan.

Perusahaan yang bersedia dalam mengeluarkan biaya-biaya terkait lingkungannya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki komitmen akan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk tanggung

jawab untuk mengungkapkan emisi karbon. Semakin tinggi biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga upaya perusahaan untuk menungkapkan emisi karbonnya.

Penelitian oleh Diyanti & Sa'diyah (2024) menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Serupa dengan Novriana & Fakhroni (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap eko-efisiensi. Menurut Hapsari *et al.* (2021) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Tidak selaras dengan penelitian Sutomo & Ridhawati (2023) menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Serupa Adyaksana *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Faktor ketiga yang juga merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu kinerja karbon. Kinerja karbon menggambarkan nilai atau besaran karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Velte *et al.*, (2020), kinerja karbon merupakan hasil emisi kuantitatif yang berasal dari gas rumah kaca yang mengubah iklim serta langkah-langkah dan proses yang digunakan untuk mengurangi emisi karbon. Adanya kinerja karbon merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengurangi emisi karbonnya melalui berbagai macam cara, diantaranya pengurangan emisi karbon per *output*, penggantian atau minimalisasi bahan padat karbon, serta pengurangan penggunaan energi (Shaharudin & Fernando, 2021) dalam (Ladista *et al.*, 2023).

Kinerja karbon memiliki kaitan yang erat dengan pengungkapan emisi karbon, dimana perusahaan cenderung melaporkan kinerja karbon yang telah dicapai secara sukarela untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan tentang emisi karbon yang dihasilkan (Iratiwi & Sulfitri, 2023). Kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbonnya dapat melalui berbagai metode pelaporan, regulasi, serta teknologi pemantauan yang mendukung transparansi. Perusahaan yang menggunakan kemampuannya untuk mengungkapkan emisi karbon akan menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Menurut Velte *et al.* (2020) kinerja karbon memiliki hubungan yang positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ladista *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa kinerja karbon berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Luo (2019) menunjukkan bahwa kinerja karbon berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono *et al.*, (2020) dan Iratiwi & Sulfitri (2023) yang menunjukkan bahwa kinerja karbon tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Faktor lainnya yang dapat mendukung atau mempengaruhi pengungkapan emisi karbon selain modal intelektual hijau, biaya lingkungan, dan kinerja karbon yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang sahamnya dimiliki oleh lembaga eksternal seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Umumnya, investor institusional memiliki jumlah investasi yang terbilang besar yang dapat memiliki kendali besar juga atas perusahaan tersebut, sehingga dalam hal ini peran dari terdapatnya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi peningkatan pengendalian dan pengawasan yang optimal pada tingkah laku manajer (Pratika & Nurhayati, 2022). Peningkatan pengendalian dan pengawasan tersebut dapat digunakan untuk melakukan program terkait dengan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Tingginya kepemilikan institusional diharapkan dapat memberikan tekanan pada pihak manajemen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungannya dalam mengungkapkan emisi karbon. Tanggung jawab lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon dapat memperkuat kinerja perusahaan dalam hal transparansi keberlanjutan. Perusahaan yang peduli akan transparansinya dalam mengungkapkan emisi karbon akan mendapatkan reputasi dan citra yang baik dimata para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Peneliti Amaliya & Solikhah (2019), Angelina & Handoko (2023) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan insitusional memiliki peran penting dalam tercapainya transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Berbeda dengan hasil dari peneliti Suherman & Kurniawati (2023), Wulandari & Sasongko (2024) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Tidak ada pengaruh kepemilikan institusional untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dapat dikarenakan

investor institusi belum memiliki pengaruh yang kuat untuk menekan pihak manajemen dalam melaksanakan kebijakan pengungkapan emisi karbon, karena para pemegang saham institusional lebih berfokus pada kestabilan keuangan perusahaan dibandingkan dengan tanggung jawab lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti variabel-variabel terkait menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang terus terjadi akibat dari perusahaan yang mengeluarkan banyak polusi serta adanya tuntutan dari para pemangku kepentingan dan aturan pemerintah mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan emisinya, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon yang berjudul **“Pengaruh Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Apakah Modal Intelektual Hijau berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
2. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?
3. Apakah Kinerja Karbon berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon?

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh Modal Intelektual Hijau terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
2. Untuk menguji pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
3. Untuk menguji pengaruh Kinerja Karbon terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian pada penelitian ini dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi perusahaan dan para pembaca mengenai penerapan teori legitimasi yang digunakan dalam merespon tekanan eksternal untuk mempertahankan legitimasi perusahaan. Dengan memahami teori legitimasi, menjadi dasar dari penggunaan variabel-variabel, seperti Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai keterkaitan Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon, Dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

1.5 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

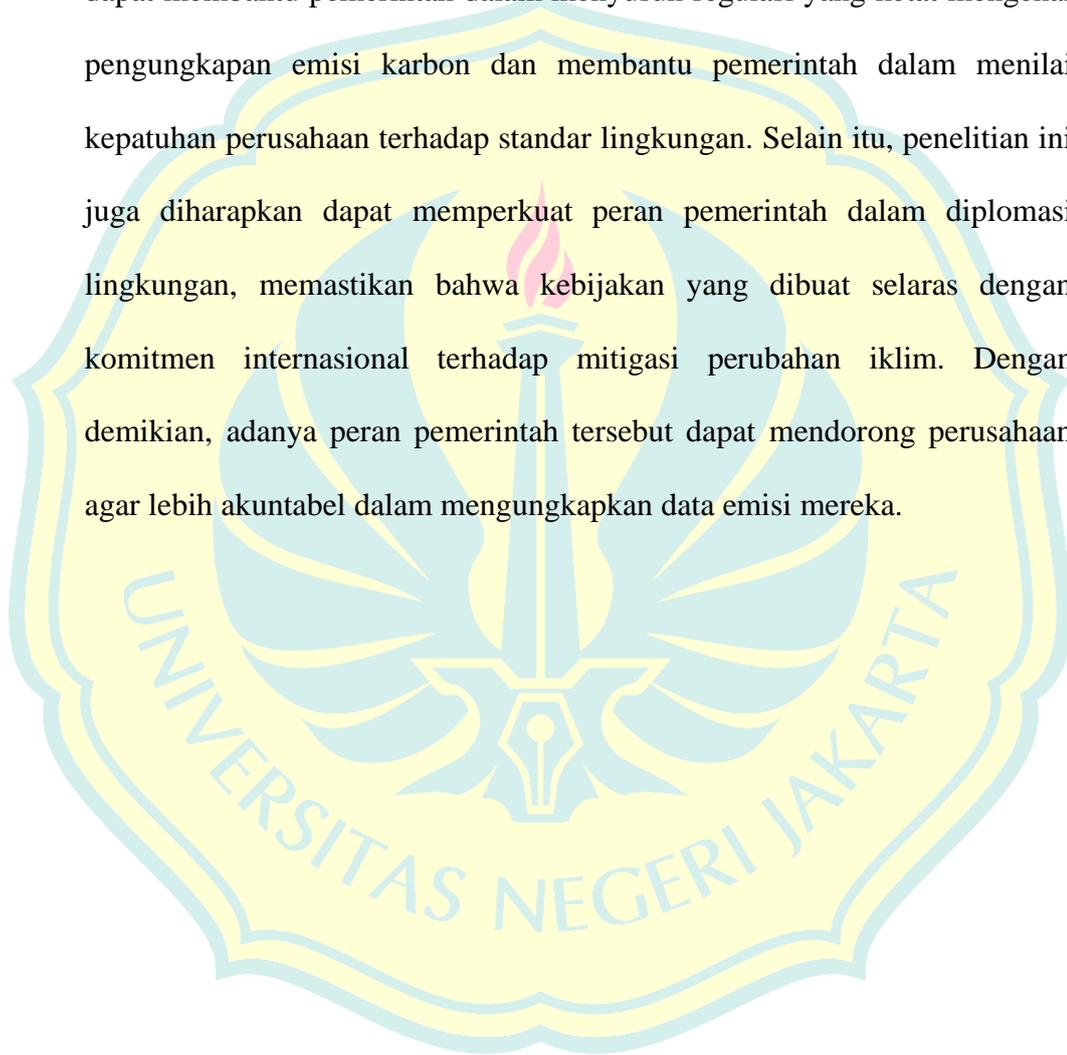
Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk secara aktif peduli terhadap kondisi lingkungan perusahaan terutama dalam menghasilkan emisi karbon. Selain itu, diharapkan juga bagi perusahaan untuk segera menerapkan kebijakan dan aturan yang berlaku untuk mengungkapkan emisi karbon. Faktor-faktor seperti Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon dan Kepemilikan Institusional inilah yang memiliki peranan besar dalam mengungkapkan emisi karbon demi tercapainya *Net Zero Emission* di masa depan.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon. Dengan transparansi dalam pengungkapan emisi karbon yang dipengaruhi oleh Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon dan Kepemilikan Institusional, peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan tekanan sosial terhadap perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam memperkuat komitmennya untuk mengungkapkan emisi karbon.

d. Bagi Regulator

Penelitian dengan faktor-faktor seperti Modal Intelektual Hijau, Biaya Lingkungan, Kinerja Karbon dan Kepemilikan Insitutional ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun regulasi yang ketat mengenai pengungkapan emisi karbon dan membantu pemerintah dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah dalam diplomasi lingkungan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat selaras dengan komitmen internasional terhadap mitigasi perubahan iklim. Dengan demikian, adanya peran pemerintah tersebut dapat mendorong perusahaan agar lebih akuntabel dalam mengungkapkan data emisi mereka.



Intelligentia - Dignitas